



Judul : DPR Minta Belanja Lebih Bijak pada 2024
Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

DPR Minta Belanja Lebih Bijak pada 2024

Pemerintah dinilai perlu berusaha lebih keras mencapai target ekonomi yang ambisius di tengah ketidakpastian dan kondisi yang menantang tahun depan.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat menilai target asumsi ekonomi makro yang diusulkan pemerintah untuk tahun 2024 cukup menantang di tengah ketidakpastian perekonomian global dan politik dalam negeri. Guna mencapai target yang ambisius itu, pemerintah diharapkan bisa membelanjakan anggaran dengan lebih bijak dan produktif.

Dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023), sembilan fraksi di DPR menyampaikan sikap terhadap usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024 yang diserahkan pemerintah kepada DPR pekan lalu.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai pendukung pemerintah, misalnya, menilai target yang dipasangkan pemerintah cukup ambisius. "Apalagi mengingat masih tingginya dinamika ekonomi global dan risiko ketidakpastian di dalam negeri akibat momen pemilihan umum dan pergantian kepemimpinan nasional," kata Juru Bicara Fraksi PPP Muhammad Aras.

Sebagai gambaran, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 2024 di kisaran 5,3-5,7 persen, laju inflasi di rentang 1,5-3,5 persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar AS Rp 14.700-Rp 15.300. Selain itu, tingkat bunga surat utang negara (SUN) 10 tahun disasar 6,49-6,91 persen, harga minyak mentah Indonesia 75-85 dollar AS per barel, *lifting* minyak bumi 597.000-652.000 barel per hari, dan *lifting* gas bumi berkisar 999.000-1.054.000 barel setara minyak per hari.

Ia mengatakan, secara historis, kondisi ekonomi pada ta-

hun transisi kepemimpinan biasanya melemah karena pelaku usaha menanti kepastian politik. "Pelaku usaha yang jadi salah satu penyumbang utama penerimaan perpajakan umumnya baru mau ekspansi atau mengakselerasi aktivitas usaha ketika kabinet baru sudah terbentuk," kata Aras.

Pemerintah dinilai perlu berusaha lebih keras untuk mencapai target ekonomi yang ambisius itu. Dari sisi belanja negara, pemerintah diharapkan bisa membelanjakan anggaran negara lebih optimal. Mengacu pada pengalaman selama ini, ujarnya, realisasi belanja negara sering kali terlambat.

Dalam KEM-PPKF 2024, pemerintah menargetkan belanja negara di kisaran 13,97-15,01 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp 3.215,7 triliun-Rp 3.476,2 triliun. Sementara target pendapatan negara diasumsikan 11,81-12,38 persen dari PDB atau Rp 2.719,1 triliun-Rp 2.865,3 triliun.

Ibu kota

Dua fraksi lainnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, menyoroti prioritas belanja negara tahun depan. Kedua fraksi non-pendukung pemerintah itu meminta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat ditunda pelaksanaannya supaya tidak menambah beban anggaran.

Saat menyampaikan paparan pandangan fraksinya, Juru Bicara Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, pembangunan IKN bukan prioritas utama di tengah kebutuhan anggaran untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Hal senada disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin, yang menilai

anggaran untuk pembangunan IKN sebaiknya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memulihkan daya beli, dan memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.

Fraksi PKS juga menyoroti kebijakan insentif pada industri kendaraan listrik yang dinilai sebagai pemborosan anggaran. "Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan ke industri kendaraan listrik hanya akan dinikmati segelintir pelaku usaha dan konsumen kelas atas. Insentif ini tidak menyentuh tujuan afirmatif dari belanja perpajakan," katanya.

Pekan lalu, saat memaparkan poin-poin KEM-PPKF 2024 di rapat paripurna DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan memastikan belanja negara diarahkan untuk mencapai sasaran dan target prioritas nasional. Hal itu di antaranya penuntasan proyek strategis nasional dan prioritas lainnya.

Beberapa proyek prioritas itu antara lain pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. "Pemerintah akan terus mendorong penguatan belanja yang lebih berkualitas sebagai komitmen bersama," ujarnya.

Guna menopang kebutuhan belanja tahun depan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan, berkaca dari tahun ini, berbagai sumber penerimaan masih dalam kondisi baik.

Penerimaan pajak tahun depan dinilai akan mendapat dukungan dari pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya dari pajak pertambahan nilai. (AGE)